



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM)
UNIT KERJA : SEKRETARIAT UTAMA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HENRY HANDOYO
2. Jabatan : KEPALA BALAI KALIBRASI
3. NHK : 404572

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 895.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 178 m2/178 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 625.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/54 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 112.000.000

1. MOTOR, HONDA REVO FIT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
2. MOTOR, VESPA PX Tahun 1982, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOTOR, HONDA GL 100 K Tahun 1995, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
4. MOTOR, HONDA Y3B02R17LO MT/SOLO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
5. MOBIL, DAIHATSU LUXIO 1.5 D MT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 7.700.000

D. SURAT BERTAGIH Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.894.479

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.016.594.479

III. HUTANG Rp. 302.390.300



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

714.204.179

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.